

### BAB III

## ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas adalah :

- Lahan usaha dan lahan pekarangan warga transmigrasi sering terendam banjir.
- Minimnya tingkat pendidikan peserta transmigrasi.
- Kondisi sarana dan prasarana permukiman yang kurang memadai sehingga dapat menghambat aksesibilitas dari dan keluar lokasi transmigrasi, hal ini disebabkan belum optimalnya dukungan sector terkait untuk pengembangan wilayah transmigrasi.

Uraian lebih detail tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD dapat dilihat Tabel 1.3. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas, Tabel 2.3. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) dan Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Transmigrasi berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan pendorong Keberhasilan Penanganannya.

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menelaah visi dan Misi, Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas transmigrasi Kabupaten Kapuas yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala Daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Transmigrasi Kabupaten Kapuas yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Transmigrasi, oleh karena itu isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih.

*Visi* Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas “Terwujudnya Kabupaten Kapuas yang Lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri melalui Pembangunan yang Adil dan Merata serta Berkelanjutan”

*Misi* Pemerintah Kabupaten Kapuas :

1. Mempercepat Pembangunan Peningkatan Jalan, jembatan, irigasi, jalan desa, jalan usaha tani, pelabuhan terminal, pasar, listrik, air bersih, perumahan dan kawasan

- pemukiman layak huni, jaringan komunikasi serta infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kerakyatan.
2. Meningkatkan usaha pertanian masyarakat yang meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, dengan melibatkan para petani lokal dan transmigrasi dengan semangat kebersamaan sesuai falsafah Huma Betang
  3. Mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memberikan kemudahan kepada dunia usaha serta tetap memperhatikan hak masyarakat.
  4. Memberikan kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi
  5. Mengoptimalkan dan mewujudkan kemitraan antara pemerintah, pengusaha atau pihak ke tiga dan masyarakat secara harmonis yang saling menguntungkan.
  6. Melindungi, menghargai dan mengakui tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah bagi seluruh masyarakat kabupaten kapuas melalui kelembagaan adat dayak.
  7. Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian masyarakat dan daerah guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
  8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan di semua jenjang untuk memberikan kesempatan kepada semua golongan masyarakat memperoleh pendidikan bermutu dengan menyelenggarakan pendidikan gratis 12 Tahun pada tingkat SD/Madrasah Ibtidaiyah, SLTP/Madrasah Tsanawiyah, SLTA/Madrasah Aliyah, baik negeri maupun swasta serta memberikan beasiswa.
  9. Mengembangkan dan mendorong peningkatan ketrampilan bagi kaum wanita, kelompok pemuda, remaja putus sekolah, penyandang cacat melalui kemitraan dan Balai Latihan Kerja untuk meraih kehidupan yang lebih baik.
  10. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang mudah, murah, adil dan merata serta pembangunan fasilitas kesehatan, penempatan tenaga kesehatan, penyediaan obat-obatan dan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu.
  11. Meningkatkan pembinaan kegiatan kepemudaan, kepramukaan, olah raga, seni budaya serta pengembangan pariwisata.
  12. Meningkatkan peran dan fungsi kepala desa, perangkat desa, RT/RW, guru agama, guru ngaji, guru sekolah minggu, damang, mantir adat, basir, pemangku agama hindu, pedanda serta memberikan insentif.
  13. Meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan golongan dengan melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, LSM serta komunitas masyarakat lainnya.
  14. Mempercepat reformasi birokrasi menuju pelayanan prima, dengan semangat kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja berkualitas dan kerja tuntas dengan

meningkatkan kesejahteraan PNS, Tenaga Kesehatan dan Guru Non PNS, Penyediaan Fasilitas yang memadai dan berkualitas serta pemberian insentif.

Tabel 4.3. Menggambarkan Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi / Kabupaten**

Yang menjadi permasalahan dibidang ketransmigrasian pada umumnya adalah minimnya jumlah aparatur ketransmigrasian baik kuantitas maupun kualitas, terbatasnya infrastruktur pendukung yang membuka akses antara lokasi transmigrasi dengan pusat-pusat pemasaran dan koordinasi dan kerjasama lintas sector dan lintas pelaku belum optimal.

Berikut Tabel 5.3. Menggambarkan Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Transmigrasi berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya.

### **3.4. Telaahan Renstra Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup**

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah, pengembangan transmigrasi Kabupaten Kapuas dihadapkan pada keterbatasan lokasi karena fungsi kawasan hutan yang dapat dijadikan lokasi transmigrasi adalah Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan Produksi yang bisa di Konversi (HPK). Disamping itu permasalahan tumpang tindih lahan transmigrasi dengan Perusahaan Perkebunan. Disisi lain animo masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi sangat tinggi.

Hasil Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 6.3, Tabel 7.3 dan Tabel 8.3.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan telaahan di atas, dapat ditentukan sasaran dibidang ketransmigrasian sebagai berikut :

- Untuk sasaran jangka menengah, yaitu peningkatan kapasitas SDM masyarakat dan aparatur Penyelenggara Transmigrasi, Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan melalui pengembangan transmigrasi.
- Implikasi RTRW membawa dampak pelayanan dibidang ketransmigrasian antara lain tidak tersedianya lokasi transmigrasi, calon lokasi transmigrasi tumpang tindih dengan lahan perkebunan.